

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan gabungan dari dua konsep utama, yakni manajemen dan PKL itu sendiri. Manajemen dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus seni dalam mengatur serta mengelola pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal, baik secara efektif maupun efisien, guna mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif ilmiah, manajemen memenuhi syarat sebagai ilmu karena memiliki landasan teori, prinsip, konsep, dan metode ilmiah yang sistematis dalam mengelola organisasi. Di sisi lain, sebagai seni, manajemen mencerminkan keterampilan individu dalam berkreasi dan berinovasi dalam mengatur suatu proses (Hasibuan, 2007:2). Manajemen juga mencakup serangkaian fungsi pokok yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang keseluruhannya bertujuan untuk mengelola sumber daya secara terpadu dalam menghasilkan produk atau layanan (Faizal dkk, 2018:139). Sementara itu, Mulyono (2010:15) menyatakan bahwa esensi manajemen adalah melaksanakan aktivitas tertentu melalui keterlibatan orang lain.

Husaini dkk mengutip definisi manajemen dari teori Federick Winslow Taylor (1911) *is experiments carried out in earnest in order to deal with every problem that arises in every organizational leadership every system of cooperation carried out by every human being with the attitude and spirit of a scholar and the use of formulation tools*. Artinya bahwa manajemen adalah sebuah percobaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan setiap persoalan yang

muncul dalam organisasi. Dari pendapat George Robert Terry (1979) menyatakan *management is a typical process that consists of several actions, namely planning, organizing, mobilizing, and controlling*. Maknanya adalah manajemen sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Husaini dkk, 2019:45). Toke dan Kalande (2021:2) berpendapat *management is a regulatory process and utilization of existing resources organization through the cooperation of the members to achieve organizational goals effective and efficient*. Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dari beberapa pengertian manajemen yang disampaikan beberapa ahli bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur sumber daya yang ada dilakukan oleh setiap orang atau orang, kelompok maupun organisasi melalui proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada hakikatnya merupakan bagian dari program pendidikan yang dirancang berdasarkan pendekatan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yang pelaksanaannya dilakukan di dua lokasi utama. Pertama, kegiatan pembelajaran teori dilakukan di sekolah, sedangkan pelatihan keterampilan praktik dilaksanakan di dunia usaha atau industri yang berfungsi sebagai institusi mitra. Kedua institusi yakni sekolah dan industri berperan dalam proses evaluasi peserta didik, di mana penilaian dilakukan baik oleh guru maupun oleh instruktur di tempat praktik. Secara umum, ruang lingkup PKL mencakup

pembelajaran teori kejuruan, pelatihan dasar keterampilan, serta pengalaman kerja langsung di lingkungan industri (Nurharjadmo, 2008:220).

Ismail *et al* (2015:82) mengatakan bahwa praktik kerja industri atau *work-based learning is defined as a coherent sequence of job training and work experience that involves actual work experience and connects classroom learning to work activities*. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa prakerin merupakan perpaduan persiapan yang dilakukan di sekolah (berbasis sekolah) dan melalui pengalaman kerja di dunia nyata, yang didesain agar siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk kepentingan karir dalam setting kerja yang nyata.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bentuk pembelajaran yang ditujukan bagi peserta didik di jenjang SMK/MAK, SMALB, dan LKP, yang dilaksanakan dalam bentuk praktik kerja langsung di dunia usaha atau industri dalam kurun waktu tertentu, selaras dengan kurikulum serta kebutuhan dunia kerja (Permendikbud, 2020). PKL menjadi bagian integral dari program pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menitikberatkan pada pengembangan keterampilan dan keahlian peserta didik. Program ini umumnya diselenggarakan secara terpadu di dua lokasi, yaitu di lingkungan sekolah serta di perusahaan, instansi, atau dunia usaha sebagai mitra (Sihotang, 2017:7). Pelaksanaan kegiatan PKL bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, terutama dalam membekali siswa dengan pengalaman nyata mengenai dunia kerja serta kemampuan dalam menangani tugas secara profesional. Menurut Faizal dkk (2018:139), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau PKL merupakan bentuk penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan kejuruan yang dirancang secara

sistematis dan harmonis dengan tujuan pembelajaran di sekolah kejuruan serta program keahlian, melalui keterlibatan langsung peserta didik di dunia kerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323/U/1997 pasal 1, Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian yang dirancang secara sistematis dan terintegrasi antara program pendidikan di sekolah menengah kejuruan dan proses penguasaan keterampilan melalui pengalaman kerja nyata di institusi mitra. Program ini diarahkan untuk mencapai jenjang keahlian profesional tertentu (Kemendikbud, 1997). Menurut Mastur dan Pramusinto (2020:791), prakerin adalah kegiatan pendidikan kejuruan yang dilaksanakan oleh sekolah melalui kerja sama dengan dunia usaha atau industri. Dalam pelaksanaannya, siswa menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolah dengan tujuan membekali mereka pengalaman nyata sebagai persiapan memasuki dunia kerja.

Dengan demikian Praktik Kerja Lapangan yang disingkat dengan “PKL” merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik di dunia kerja, sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK yaitu Pendidikan Sistem Ganda.

Menurut Mulyasa (2005:7), manajemen Praktik Kerja Lapangan (PKL) mencakup seluruh proses pengelolaan pelaksanaan praktik kerja industri yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Sukarnati (2011:130) dalam penelitiannya menguraikan bahwa manajemen PKL terdiri dari beberapa tahap penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Senada dengan itu,

Sihotang (2017:31) menjelaskan bahwa manajemen PKL mencakup rangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap program praktik kerja siswa SMK di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI). Sementara itu, Harianti dan Basri (2020:82) menyatakan bahwa manajemen praktik kerja industri adalah proses penyelenggaraan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program pembelajaran, baik yang dilakukan di sekolah maupun di lingkungan industri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi keahlian siswa melalui pengalaman belajar yang bersifat langsung dan kontekstual.

Maka manajemen PKL adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses praktek kerja industri yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam dunia kerja industri (Oemar Hamalik, 2007:16). Maria Dwi Wijayanti (2010:55), merujuk pada Depdikbud (1997:7), menyebutkan beberapa tujuan PKL atau Prakerin, antara lain: (1) meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan kejuruan melalui keterlibatan institusi pasangan dari dunia usaha dan dunia industri (DU/DI); (2) mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; (3) membentuk lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan teknis, tetapi juga sikap profesional sebagai bekal pengembangan diri secara berkelanjutan; (4) memperkaya wawasan dan penghargaan siswa terhadap pengalaman kerja

sebagai bagian integral dari proses pendidikan; serta (5) meningkatkan efisiensi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia di dunia kerja secara optimal.

Menurut Mastur dkk (2020:790), pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk membekali lulusan dengan pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, PKL juga berperan dalam membentuk disiplin kerja siswa serta menanamkan penghargaan terhadap pengalaman kerja. PKL memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa karena melalui kegiatan ini mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman langsung dari lingkungan kerja yang sesungguhnya. Meski manfaatnya juga dirasakan oleh institusi pendidikan dan dunia industri, siswa tetap menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pelaksanaan program ini.

Manfaat yang diperoleh siswa dari kegiatan PKL antara lain: (1) memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan manajerial dalam konteks kerja nyata, yang sekaligus berfungsi sebagai ajang penerapan konsep, teori, atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya; (2) menambah pengalaman praktis yang memperkaya hasil pembelajaran selama PKL; (3) melatih kemampuan peserta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan manajerial di lapangan dengan mengandalkan kompetensi yang dimiliki; dan (4) menjadi sarana persiapan yang konkret bagi peserta untuk memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan program PKL (Hamalik, 2007:93).

Dari sisi sekolah, program PKL berkontribusi dalam membangun citra positif lembaga serta memperkuat jejaring kerja sama dengan masyarakat. Sementara itu, bagi pihak industri, PKL memberikan manfaat berupa ketersediaan

tenaga kerja sementara dengan kompensasi yang fleksibel, serta berdampak positif terhadap peningkatan citra perusahaan (Oemar Hamalik, 2007:94)..

Departemen Pendidikan Nasional (2008:7) mengemukakan bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau istilah lainnya adalah Prakerin (Praktik Kerja Industri) memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi peserta didik. *Pertama*, pengalaman praktik di dunia kerja menjadikan hasil pembelajaran lebih bermakna, karena lulusan tidak hanya memiliki pemahaman teoritis tetapi juga bekal keterampilan profesional yang konkret, yang sangat berguna dalam memasuki dunia kerja serta dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan. *Kedua*, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keahlian profesional menjadi lebih singkat karena siswa telah memperoleh pengalaman kerja sejak dini. *Ketiga*, keterampilan profesional yang diperoleh melalui keterlibatan langsung di dunia industri mampu meningkatkan harga diri serta rasa percaya diri lulusan, yang pada akhirnya dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan keahlian ke jenjang yang lebih tinggi.

Peter Drucker (1974) menyatakan bahwa salah satu peran utama manajemen adalah menetapkan arah dan tujuan organisasi, memberikan kepemimpinan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, serta mengambil keputusan terkait pemanfaatan sumber daya organisasi secara optimal (Putri, 2020:16). Berdasarkan pandangan Drucker ini, pengelolaan praktik kerja industri (Prakerin) perlu dilaksanakan secara terencana dan sistematis agar proses pelaksanaannya dapat dievaluasi dengan tepat, akurat, dan menyeluruh. Tujuan dari manajemen Prakerin tersebut mencakup: (1) Produktivitas, yaitu pencapaian hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin; (2) Kualitas, yang merujuk pada ukuran objektif untuk menilai

mutu barang atau jasa berdasarkan kinerja dan bobot nilai yang dimilikinya; (3) Efektivitas, sebagai indikator sejauh mana suatu kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan (4) Efisiensi, yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan secara tepat guna, yaitu mencapai hasil optimal dengan penggunaan sumber daya secara ekonomis.

Beberapa hasil penelitian tentang hubungan Prakerin atau PKL dengan kesiapan bekerja bagi siswa SMK, salah satunya dapat dilihat dalam penelitian Baiti dan Munadi (2016). Dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pengalaman Praktik, Prestasi Belajar Dasar Kejuruan Dan Dukungan Orang Tua Terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK, ditemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan praktik kerja industri secara simultan terhadap kesiapan kerja siswa kelas XI SMK Hidayah Semarang Tahun Ajaran 2018/2019 sebesar 47,3%, yang artinya semakin tinggi minat mengikuti praktik kerja maka semakin tinggi tingkat kesiapan kerja siswa.

Syamsuddin (2019) dalam penelitiannya berjudul Peran SMK Sebagai *Specific Human Capital* Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Memasuki Dunia Kerja, diperoleh hasil penelitian bahwa SMK memiliki peran yang baik menurut pihak sekolah dan sangat baik menurut pengguna lulusan sebagai *specific human capital* dalam mempersiapkan SDM untuk memasuki dunia kerja, Lulusan SMK memiliki kesiapan kerja dengan kategori siap untuk memasuki dunia kerja menurut lulusan, Terdapat hambatan yang dihadapi SMK di Kabupaten Luwu dalam memasuki dunia kerja, salah satunya adalah banyaknya DU/DI tidak menerima siswa dalam melaksanakan PKL dikarenakan siswa tidak lolos dalam seleksi keterampilan yang dilakukan pihak DU/DI.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam A. Alimudin (2018:179) mengenai Studi Kesiapan Kerja Peserta Didik SMK untuk Bekerja di Industri Perbaikan Bodi Otomotif menunjukkan bahwa mayoritas siswa SMK memiliki kesiapan yang tinggi untuk bekerja di industri tersebut. Dari aspek pemahaman, pengetahuan, dan kepribadian, sebagian besar peserta didik menunjukkan kesiapan kerja yang sangat tinggi, sedangkan dari aspek keterampilan, lebih dari setengahnya tergolong dalam kategori kesiapan kerja yang tinggi. Temuan serupa juga diperoleh dari penelitian Arthur (2018) yang meneliti hubungan antara praktik kerja industri dan kesiapan kerja siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 1 Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan praktik kerja industri dengan kesiapan kerja siswa, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,41 yang berada dalam kategori hubungan sedang. Nilai thitung yang lebih besar dari ttabel memperkuat adanya hubungan signifikan tersebut.

Sementara itu, Ervandi (2014:1) menemukan bahwa pengalaman praktik kerja industri berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa kelas XII pada Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video di SMK N 2 Bawang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad (2014:133) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman praktik kerja industri (X) terhadap kesiapan kerja siswa (Y). Dengan demikian, berdasarkan hasil beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengalaman siswa selama mengikuti praktik kerja industri berkontribusi secara positif terhadap kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Praktik Kerja Industri (Prakerin) dapat meningkatkan kesiapan kerja peserta didik SMK, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dampak positif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam dunia ketenagakerjaan nasional. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019 mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 7,05 juta orang. Yang mengkhawatirkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tercatat sebagai penyumbang tertinggi dalam angka pengangguran tersebut. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 50 ribu orang atau sebesar 0,7%. Bahkan, bila merujuk pada data Februari 2019, ketika jumlah pengangguran berada di angka 6,82 juta orang, peningkatan pengangguran pada Agustus 2019 mencapai sekitar 3,4%.

Meskipun secara umum tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan tipis dari 5,34% pada Agustus 2018 menjadi 5,28% pada Agustus 2019, lulusan SMK masih mendominasi TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Sebagai perbandingan, pada Februari 2017 dan Februari 2018, TPT lulusan SMK masing-masing berada pada angka 9,27% dan 8,92%, lalu turun menjadi 8,63% pada Februari 2019. Namun, penurunan ini belum mencerminkan perbaikan yang signifikan. Justru pada Agustus 2019, TPT lulusan SMK kembali melonjak menjadi 10,42%, disusul oleh lulusan SMA sebesar 7,92% dan lulusan pendidikan diploma I/II/III sebesar 5,99% (BPS, 2019). Fakta ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, atau dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara penawaran tenaga kerja lulusan SMK dan permintaan dari industri.

Secara teoretis, sebagaimana disampaikan oleh Oemar Hamalik (2007) dan Dwi Wijayanti (2010), PKL dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri. Tujuan PKL juga meliputi upaya untuk menjembatani transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja agar peserta didik dapat beradaptasi dan siap terjun langsung ke bidang pekerjaannya setelah menyelesaikan pendidikan. Dalam konteks ini, PKL diharapkan menjadi sarana penyiapan sumber daya manusia yang andal dan kompeten. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tujuan mulia tersebut belum sepenuhnya tercapai, sebagaimana dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK.

Hal serupa ditegaskan oleh Depdiknas (2008), yang menyebut bahwa salah satu manfaat PKL adalah memberikan bekal keahlian profesional bagi peserta didik agar mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Namun, manfaat tersebut belum banyak dirasakan oleh lulusan SMK secara luas, terutama jika dilihat dari minimnya tingkat penyerapan tenaga kerja lulusan SMK oleh industri.

Lebih lanjut, berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, seperti pelaksanaan program revitalisasi SMK yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan kejuruan dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, belum menunjukkan dampak yang berarti terhadap peningkatan keberkerjaan lulusan. Hal ini terlihat dari data Karakteristik Penduduk Bekerja (KPB), di mana persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun 2018 berada pada angka 11,03%, dan hanya naik tipis menjadi 11,73% pada tahun 2019. Kenaikan sebesar 0,70% ini terbilang sangat kecil dan belum sebanding dengan investasi dan perhatian besar

yang telah diberikan dalam rangka revitalisasi pendidikan kejuruan. Dengan demikian, meskipun PKL secara konseptual merupakan bagian penting dalam membentuk kesiapan kerja siswa, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada rendahnya daya saing lulusan SMK di pasar kerja.

Tabel 1.1 Karakteristik Penduduk Bekerja Agustus 2015 -2019

Karakteristik Penduduk Bekerja	Agustus 2015		Agustus 2016		Agustus 2017		Agustus 2018		Agustus 2019	
	juta orang	persen (%)	juta orang	persen (%)	juta orang	persen (%)	juta orang	persen (%)	juta orang	persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan										
SD ke Bawah	50,83	44,27	49,97	42,20	50,98	42,13	50,46	40,69	50,18	39,66
Sekolah Menengah Pertama	20,70	18,03	21,36	18,04	21,72	17,95	22,43	18,09	22,62	17,88
Sekolah Menengah Atas	19,81	17,25	20,41	17,24	21,13	17,46	22,34	18,01	23,19	18,33
Sekolah Menengah Kejuruan	10,84	9,44	12,17	10,28	12,59	10,40	13,68	11,03	14,84	11,73
Diploma I/II/III	3,08	2,68	3,41	2,88	3,28	2,71	3,45	2,78	3,41	2,70
Universitas	9,56	8,33	11,09	9,36	11,32	9,35	11,65	9,40	12,27	9,70
Jumlah	114,82	100,00	118,41	100,00	121,02	100,00	124,01	100,00	126,51	100,00

Sumber: BPS 5 November 2019

Kondisi pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa luaran SMK belum mampu bersaing dengan luaran jenjang pendidikan lainnya, seperti SD, SMP, maupun SMA. Padahal tamatan SMK dipersiapkan untuk mampu bersaing secara global dan mampu bekerja sebagai tenaga ahli dibidangnya (Sudji Munadi, 2014:1).

Fakta di lapangan berdasarkan hasil *study tracer* yang dilakukan SMK Negeri 1 Sirandorung Tapanuli Tengah terhadap siswa lulusan tahun 2018 program studi Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (TIPTL) terhadap sejumlah 321 orang lulusan dan lulusan SMK Negeri 1 Manduamas jurusan Akuntansi Keuangan. Melalui hasil pelacakan yang dilakukan melalui *google form* diperoleh data menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk pengkategorian pada masa tunggu bekerja, bidang pekerjaan yang digeluti.

Tabel 1.2 Data *Tracer Study* SMK N 1 Sidandorung dan SMK N 1 Manduamas Tahun 2019

No	Sekolah/Jurusan	Jlh Lulusan	Respon	Bekerja/Studi		Masa Tunggu			Keseuaian Bidang Kerja	
				Bekerja	Lanjut Studi	0-1 Bln	1-3 Bln	4-6 Bln	Sesuai	Tidak Sesuai
1	SMK Negeri 1 Sirandorung (Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik)	312	175	121	6	8	26	141	21	100
2	SMK Negeri 1 Manduamas (Akuntansi Keuangan Negara)	48	25	18	7	2	12	4	10	8

Berdasarkan tabel 1.2 data *Tracer Study* tahun 2019 di SMK Negeri 1 Sirandorung dan SMK Negeri 1 Manduamas, terlihat bahwa tingkat respons lulusan terhadap survei cukup beragam. Dari 312 lulusan SMK Negeri 1 Sirandorung jurusan Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebanyak 175 orang (56,09%) memberikan respons. Dari jumlah tersebut, 121 orang (69,14%) telah bekerja, sementara 6 orang (3,43%) melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan juga beragam, di mana 8 orang (4,57%) memperoleh pekerjaan dalam 0-1 bulan, 26 orang (14,86%) dalam 1-3 bulan, dan mayoritas, yaitu 141 orang (80,57%), membutuhkan waktu 4-6 bulan untuk bekerja. Dari segi kesesuaian bidang kerja, hanya 21 orang (17,36%) yang bekerja sesuai dengan kompetensi yang diperoleh di sekolah, sementara 100 orang (82,64%) bekerja di bidang yang tidak sesuai.

Sementara itu, di SMK Negeri 1 Manduamas, khususnya jurusan Akuntansi Keuangan Negara, dari 48 lulusan, hanya 25 orang (52,08%) yang memberikan respons terhadap survei. Dari jumlah tersebut, 18 orang (72%) telah bekerja dan 7 orang (28%) melanjutkan studi. Masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan menunjukkan bahwa 2 orang (11,11%) memperoleh pekerjaan dalam 0-1 bulan, 12

orang (66,67%) dalam 1-3 bulan, dan 4 orang (22,22%) membutuhkan waktu 4-6 bulan. Dari segi kesesuaian bidang kerja, 10 orang (55,56%) bekerja sesuai dengan kompetensinya, sementara 8 orang (44,44%) bekerja di bidang yang tidak sesuai.

Data ini menunjukkan bahwa lulusan dari kedua sekolah memiliki tingkat keterlibatan yang cukup baik dalam dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Namun, kesesuaian bidang kerja bagi lulusan Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik masih cukup rendah dibandingkan dengan lulusan Akuntansi Keuangan Negara, yang memiliki proporsi lebih besar dalam bekerja sesuai bidangnya. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi sekolah dalam meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri serta memberikan pembekalan lebih lanjut kepada siswa terkait kesiapan kerja dan fleksibilitas dalam dunia kerja.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah merevitalisasi program Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar lebih selaras dengan kebutuhan industri. Menurut Billett (2011), pengalaman kerja yang berbasis industri memiliki kontribusi signifikan dalam membangun kompetensi profesional siswa, terutama dalam mengembangkan keterampilan teknis dan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang dinamis. Revitalisasi ini dapat mencakup pemutakhiran skema magang, di mana siswa tidak hanya ditempatkan di industri, tetapi juga diberikan pendampingan intensif dari mentor profesional di tempat kerja. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 menegaskan bahwa PKL harus berorientasi pada kebutuhan industri dan didesain secara sistematis untuk mengurangi kesenjangan kompetensi lulusan SMK dengan dunia kerja (Kemendikbud, 2020).

Selain itu, penguatan kolaborasi antara sekolah dan dunia industri perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam hal penyusunan kurikulum berbasis proyek nyata serta peningkatan fasilitas laboratorium sekolah agar lebih representatif terhadap dunia kerja yang sebenarnya. Studi yang dilakukan oleh Zainuddin, et al. (2021) menunjukkan bahwa SMK yang memiliki keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulumnya mampu meningkatkan peluang kerja lulusan hingga 30% lebih tinggi dibandingkan sekolah yang hanya mengandalkan pembelajaran berbasis teori di kelas. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang lebih relevan, sehingga ketika mereka memasuki dunia kerja, masa tunggu dapat dipersingkat dan kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi yang diperoleh di sekolah semakin meningkat.

Dari hasil *study tracer* SMK Negeri 1 Manduamas dan SMK Negeri 1 Sirandorung Tapanuli tengah menjadi gambaran bahwa daya serap kerja lulusan di DU/DI belum maksimal. Fakta ini memperkuat bahwa temuan Mastur dkk (2020), Sudji Munadi (2014), Depdiknas (2008), Oemar Hamalik (2007) yang menyatakan bahwa tamatan SMK dipersiapkan untuk mampu bersaing secara global dan mampu bekerja sebagai tenaga ahli di bidangnya melalui pengalaman PKL belum dapat dicapai dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala SMK Negeri di Kabupaten Tapanuli Tengah, ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya manajemen Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta rendahnya tingkat keterserapan lulusan SMK di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan fasilitas pendukung, khususnya keberadaan unit produksi di lingkungan sekolah. Dari total

sembilan SMK Negeri yang ada di wilayah ini, hanya dua sekolah, atau sekitar 22% yang memiliki unit produksi yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap mutu pelaksanaan PKL maupun kesiapan lulusan dalam menghadapi tuntutan kerja di sektor industri.

Unit produksi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan kejuruan yang berfungsi sebagai sarana pelatihan dan tempat pembelajaran kontekstual bagi siswa. Keberadaannya tidak hanya memberikan pengalaman praktik yang nyata, tetapi juga memungkinkan siswa untuk belajar langsung dalam suasana kerja yang menyerupai dunia industri. Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur, 1997), unit produksi memberikan sejumlah manfaat yang sangat strategis. Pertama, unit ini dapat meningkatkan pengetahuan baik bagi siswa, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Kedua, melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan produksi, keterampilan teknis siswa dan guru dapat diasah dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketiga, unit produksi menjadi media pembelajaran berorganisasi dan berwirausaha yang penting, karena melibatkan warga sekolah dalam manajemen usaha nyata. Keempat, siswa dilatih untuk disiplin dan memiliki inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan, yang merupakan soft skills penting dalam dunia kerja.

Selanjutnya, unit produksi juga memungkinkan siswa untuk memberikan pelayanan jasa kepada konsumen secara langsung, sehingga mereka terbiasa menghadapi pelanggan dan memahami prinsip pelayanan prima. Selain itu, keberadaan unit ini meningkatkan intensitas pembelajaran karena siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung (*experiential learning*). Unit produksi juga menjadi pendukung penting dalam pelaksanaan praktik kerja industri (*prakerin*) dan

berfungsi sebagai wahana pelatihan kejuruan internal bagi siswa yang belum memperoleh tempat PKL di luar sekolah. Bahkan, bagi lulusan yang belum terserap di dunia kerja, unit produksi dapat dijadikan sebagai tempat magang sementara agar mereka tetap dapat mengembangkan kompetensi sambil menunggu kesempatan kerja.

Namun, kenyataan bahwa sebagian besar SMK di Kabupaten Tapanuli Tengah belum memiliki unit produksi yang memadai menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kejuruan. Hal ini menjadi tantangan serius dalam pengembangan manajemen PKL yang efektif, sekaligus menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat kapasitas institusi pendidikan kejuruan di daerah tersebut. Tanpa adanya unit produksi yang memadai, proses pembelajaran kejuruan berisiko kehilangan dimensi praktik yang sangat dibutuhkan dalam menyiapkan lulusan yang kompeten dan siap kerja.

Sulitnya menjalin kemitraan dengan industri untuk membantu proses transisi siswa dari dunia sekolah ke dunia kerja dalam menerapkan pendekatan prakerin secara terpadu. Tidak banyak SMK yang memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pelaksanaan transisi itu. Ditambah belum adanya perangkat perundangan tentang kewajiban industri/dunia usaha melaksanakan Prakerin secara bersama dengan sekolah kejuruan. Manajemen Prakerin yang tidak terkontrol, dimana secara umum siswa SMK di Kabupaten Tapanuli Tengah mengurus sendiri proses pelaksanaan Prakerin untuk diri sendiri. Mulai dari pencarian DU/DI, pengantaran surat permohonan Prakerin ke DU/DI, berangkat ke

DU/DI hingga siswa selesai dari pelaksanaan Prakerin. Konsep tersebut bertujuan untuk memandirikan siswa.

Model penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tapanuli Tengah hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan konvensional. Perencanaan program PKL umumnya disusun berdasarkan indikator yang tercantum dalam silabus, rencana program pembelajaran, dan kurikulum formal. Dengan kata lain, rancangan program prakerin lebih berorientasi pada pemenuhan capaian pembelajaran yang bersifat administratif dan akademik, daripada mengacu pada kebutuhan nyata di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).

Dalam model konvensional ini, proses analisis program masih terbatas pada identifikasi kompetensi-kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi yang disusun oleh lembaga pendidikan. Analisis tersebut berfokus pada kemampuan-kemampuan yang dapat diajarkan dan dipelajari di lingkungan sekolah, menyesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Sayangnya, pendekatan ini belum mengarah pada analisis kebutuhan kompetensi spesifik yang sesungguhnya dibutuhkan di lapangan kerja. Akibatnya, sering kali terdapat kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga lulusan kurang memiliki daya saing yang optimal.

Lebih jauh, dalam proses perancangan program PKL, keterlibatan pakar atau ahli di bidang manajemen pendidikan belum menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik penyelenggaraan. Padahal, menurut Pamungkas (2017:1), keberadaan pakar sangat penting dalam memastikan bahwa rancangan program

berbasis ilmiah, relevan, dan aplikatif terhadap dinamika kebutuhan kerja yang terus berkembang. Para pakar ini, yang memiliki keahlian khusus dalam ilmu manajemen pendidikan, tidak hanya mampu memberikan panduan dalam pengelolaan program secara sistematis, tetapi juga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari model yang diterapkan.

Keterlibatan ahli menjadi penting karena mereka dianggap sebagai sumber terpercaya yang memiliki kredibilitas dalam menilai, memutuskan, dan memberikan rekomendasi yang valid mengenai strategi pengembangan program pendidikan. Pengetahuan dan pengalaman mereka diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan akademik dengan praktik kerja profesional, sehingga proses pembelajaran di sekolah tidak hanya teoritis, tetapi juga berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

Dengan tidak adanya kolaborasi antara sekolah dan pakar manajemen pendidikan, model PKL cenderung bersifat rutinitas dan administratif semata. Hal ini memperlemah esensi dari pelaksanaan PKL yang seharusnya mampu mengintegrasikan unsur pedagogis, kebutuhan dunia kerja, serta pengembangan karakter dan profesionalisme siswa. Maka dari itu, diperlukan transformasi dalam penyusunan model PKL agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan industri, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif antara sekolah, DU/DI, dan pakar pendidikan yang berkompeten di bidangnya.

Model manajemen PKL belum didesain berdasarkan pada kebutuhan DU/DI sebagai pengguna, tetapi masih berdasarkan pada kebutuhan praktisi dengan meminimalisir kesenjangan kurikulum SMK terhadap fasilitas yang tersedia di sekolah. Kelemahan model manajemen Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang masih

menggunakan pendekatan konvensional menunjukkan bahwa strategi ini belum sepenuhnya efektif dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia kerja. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Sukarnati (2012) yang mengidentifikasi berbagai kelemahan mendasar dalam manajemen penyelenggaraan PKL. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa proses perencanaan program PKL di sejumlah sekolah masih terbatas pada kegiatan administratif semata, seperti pencarian lokasi PKL, penyusunan dokumen administrasi, penyediaan format pelaporan, dan pembagian tugas pembimbingan serta evaluasi. Namun, yang menjadi perhatian utama adalah tidak adanya pertemuan strategis antara pihak sekolah dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) untuk menyelaraskan kompetensi peserta didik dengan kebutuhan riil dunia kerja. Akibatnya, penyiapan kompetensi siswa menjadi tidak tepat sasaran dan kurang relevan dengan tuntutan industri.

Dalam aspek pelaksanaan, kegiatan PKL cenderung bersifat terpisah dari proses pembelajaran formal di sekolah. Artinya, pengalaman kerja yang diperoleh siswa selama menjalani PKL tidak dirancang sebagai bagian yang terintegrasi dengan kurikulum dan tidak dikelola sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan yang tajam antara dunia pendidikan dan dunia kerja, padahal keduanya seharusnya saling melengkapi dalam membentuk profil lulusan yang kompeten.

Lebih lanjut, proses evaluasi terhadap hasil belajar selama pelaksanaan PKL juga dinilai belum optimal. Evaluasi sering kali dilakukan oleh instruktur dari pihak industri yang kapasitasnya dalam bidang pendidikan belum terverifikasi secara jelas. Ketidakterlibatan tenaga pendidik yang memahami prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran menyebabkan hasil evaluasi PKL menjadi kurang akurat dalam

mencerminkan perkembangan kompetensi siswa. Selain itu, sekolah juga belum memiliki mekanisme yang sistematis dalam melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PKL. Tidak adanya laporan hasil monitoring maupun analisis evaluatif membuat sekolah kehilangan dasar yang kuat dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan.

Salah satu aspek paling krusial yang belum terpenuhi dalam model konvensional ini adalah minimnya keterlibatan aktif pihak DU/DI dalam merancang dan menyelenggarakan program PKL. Dunia usaha dan industri masih diposisikan sebagai tempat praktik semata, bukan sebagai mitra strategis dalam proses pendidikan kejuruan. Padahal, partisipasi DU/DI sangat penting dalam merumuskan kompetensi yang relevan, menyusun skema pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor kerja, dan melakukan pembimbingan yang bersifat teknis sekaligus profesional.

Dengan demikian, kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa model manajemen PKL yang bersifat konvensional belum mampu menjawab tantangan *link and match* antara pendidikan dan ketenagakerjaan. Diperlukan suatu transformasi manajerial yang menekankan kolaborasi multi-pihak, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta integrasi pembelajaran berbasis pengalaman kerja agar pelaksanaan PKL benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lulusan SMK.

Dalam dinamika pembangunan pendidikan kejuruan di Indonesia, terdapat benang merah yang secara konsisten dijaga, yakni upaya peningkatan mutu satuan pendidikan kejuruan. Fokus utama dari upaya ini adalah menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga pendidikan yang mampu

menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) (Sagala, 2018:1). Akan tetapi, dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang menghambat terwujudnya tujuan tersebut.

Sagala (2018:1) mengidentifikasi empat permasalahan utama dalam pengelolaan pendidikan kejuruan. Pertama, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan kejuruan selama ini cenderung bersifat sentralistik dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan (*supply driven*), tanpa melibatkan secara aktif pihak industri sebagai pengguna lulusan. Kedua, penyusun kurikulum dan tenaga pendidik umumnya tidak memiliki pengalaman langsung di lingkungan dunia kerja maupun industri, sehingga mereka kurang memahami standar kompetensi, etos kerja, dan ekspektasi profesional yang sebenarnya diterapkan di sektor tersebut. Ketiga, pendidikan kejuruan masih banyak dijalankan dalam kerangka pendidikan demi pendidikan semata, tanpa orientasi kuat terhadap kebutuhan pasar kerja. Keempat, keterlibatan DU/DI selama ini terbatas hanya pada keluhan terhadap mutu lulusan, tanpa diiringi dengan kontribusi nyata dalam membantu sekolah memecahkan permasalahan mutu tersebut. Dunia usaha dan industri masih memandang bahwa tanggung jawab pendidikan dan pelatihan sepenuhnya berada di tangan institusi pendidikan, khususnya pemerintah (Sagala, 2018:2).

Sebagai respons atas ketimpangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dahulu Depdikbud) memperkenalkan konsep link and match, sebuah kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan kejuruan dan kebutuhan riil

dunia kerja (Depdiknas, 2018:7). Kebijakan ini mendorong integrasi dan sinergi antara sekolah dan sektor industri agar kompetensi yang diajarkan di SMK sejalan dengan tuntutan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan kerja.

SMK dan dunia usaha/industri pada dasarnya merupakan dua entitas yang saling membutuhkan. SMK berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan siap pakai, sedangkan DU/DI membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan teknis dan profesional sesuai dengan standar industri agar dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas serta kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Menurut Suryadi (2014:30), keberhasilan dunia industri dalam menghasilkan produk sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM sebagai pengelola sekaligus penggerak seluruh faktor produksi. Oleh karena itu, kualitas lulusan SMK sebagai SDM potensial menjadi faktor strategis bagi pertumbuhan industri.

Kemitraan antara SMK dan dunia usaha/dunia industri merupakan pilar utama dalam implementasi kebijakan link and match. Menurut Mulyasa (2012:10), kemitraan pendidikan kejuruan dapat dikembangkan tidak hanya dengan DU/DI, tetapi juga dengan berbagai lembaga lain seperti perguruan tinggi, sekolah sejenis, instansi pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan kejuruan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan kualitas lulusan yang lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

Secara empirik, pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di SMK dalam pendekatan pembelajaran berbasis tempat kerja (*demand driven*) melalui prakerin memiliki banyak variasi atau model. Bentuk pengembangan manajemen PKL di SMK dilakukan dengan berbagai model, seperti Pengembangan Model

Penyelenggaraan *Work Based Learning* pada pendidikan Kejuruan (Siswanto, 2011), Model Manajemen Pendidikan Sistem Ganda Dengan Prosedural Terpadu pada SMK (Damayanti, 2014), Model Manajemen Prakerin Berbasis Karakter Batak di tingkat SMK (Sihotang, 2017), dan lainnya. Persamaan luaran model manajemen PKL pada tiga penelitian tersebut adalah fokus pada bagaimana prakerin dibuat dengan berlandaskan teori manajemen yang dikembangkan oleh George R. Terry (1998) yang menitikberatkan program Prakerin di sisi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Akan tetapi kekurangan dari model tersebut bahwa desain PKL masih didominasi SMK sebagai penyedia (*supplier*) calon tenaga kerja, belum menyeimbangkan antara kebutuhan permintaan (*demand*) DU/DI.

Berdasarkan beberapa persoalan manajemen PKL dan dampak terhadap rendahnya daya serap lulusan di DU/DI, sudah seharusnya SMK mendesain manajemen PKL dengan berbasis pada kebutuhan DU/DI karena jika SMK hanya terpaku pada tuntutan kurikulum saja maka akan memperburuk dampak lemahnya daya serap DU/DI terhadap lulusan SMK. SMK membutuhkan sebuah strategi dengan mendesain manajemen PKL dengan berpendekatan pada kebutuhan DU/DI.

Pendidikan kejuruanonon, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), memegang peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan adaptif terhadap perubahan lanskap dunia kerja. Salah satu urgensi peningkatan kompetensi lulusan SMK adalah transformasi besar yang dipicu oleh perkembangan teknologi, terutama di era Revolusi Industri 4.0. Menurut laporan The McKinsey Global Institute (2017), diperkirakan sekitar 50%

jenis pekerjaan memiliki potensi untuk diotomatisasi melalui penerapan teknologi baru.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh temuan Saragih (2019), yang mengungkapkan bahwa sektor ritel di Indonesia termasuk sektor paling rentan terhadap otomatisasi. Pekerjaan tradisional seperti kasir, pramuniaga, petugas keamanan, dan petugas kebersihan terancam tergantikan oleh mesin dan sistem otomatis. Rinciannya cukup signifikan: profesi kasir terancam hilang sebesar 97%, pramuniaga 92%, petugas keamanan 84%, dan petugas kebersihan 66%. Temuan ini selaras dengan data Organisasi Perburuhan Internasional (2017), yang menunjukkan bahwa 91% tenaga kerja pada sektor ritel dan perbaikan kendaraan bermotor berada dalam risiko tinggi akibat otomatisasi.

Selain di sektor ritel, pergeseran serupa juga terjadi di bidang maritim dan pelayanan publik. Penelitian Jamaluddin dkk. (2017) menunjukkan bahwa robot bawah laut berbasis kecerdasan buatan telah dirancang untuk menggantikan peran manusia dalam eksplorasi bawah laut, termasuk dalam pengamatan ekosistem dan pemetaan terumbu karang. Sementara itu, studi oleh Putro dan Litouw (2017) mengilustrasikan bagaimana profesi penyambut pelanggan di pusat perbelanjaan digantikan oleh robot pintar yang mampu memberikan salam dan informasi kepada pengunjung. Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kebutuhan industri terhadap efisiensi operasional dan pengurangan biaya tenaga kerja.

Perkembangan teknologi robotika yang masif telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri, namun secara bersamaan juga menurunkan peran manusia dalam aktivitas ekonomi tertentu. Pekerjaan yang

menuntut ketelitian tinggi, menghadapi risiko bahaya besar, atau membutuhkan kekuatan fisik ekstrem kini lebih banyak dilakukan oleh mesin. Dalam konteks ini, manusia sebagai makhluk ciptaan yang unggul dituntut untuk terus memperbaiki kualitas dirinya agar tidak tergantikan oleh teknologi.

Oleh karena itu, SMK sebagai institusi pencetak tenaga kerja terampil memiliki tanggung jawab besar untuk menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, serta model pelatihan kerja, seperti Praktik Kerja Lapangan (PKL) agar lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Upaya ini bertujuan agar lulusan SMK tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja, tetapi juga memiliki kompetensi adaptif untuk bertahan dan berkembang dalam era disrupsi teknologi yang kian pesat.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi pendidikan dan pelatihan kejuruanonal yang bertujuan memperkuat keterampilan peserta didik melalui pengalaman langsung di dunia kerja. Keberhasilan pelaksanaan PKL sangat bergantung pada keterlibatan aktif dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) sebagai mitra utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ixtiarto dkk. (2016), kemitraan antara SMK dan DU/DI hanya dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan lingkungan kerja yang relevan dengan bidang keahlian peserta didik. Oleh karena itu, pemetaan DU/DI menjadi langkah awal yang krusial sebelum perancangan program PKL dilakukan, agar tempat praktik yang dipilih benar-benar sesuai dengan program keahlian siswa, sehingga tujuan pembelajaran berbasis industri dapat tercapai secara optimal.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas, 2017) menegaskan bahwa SMK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan lulusan terampil dan siap kerja perlu menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak eksternal, khususnya dunia usaha dan industri. Bentuk kemitraan ini direalisasikan melalui penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yang kemudian berkembang menjadi Praktek Kerja Industri (Prakerin), dan sejak tahun 2024 kembali digunakan istilah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan *link and match*, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan aktual dunia kerja (Ixtiarto dkk., 2016:41).

Konsep *link and match* merupakan penerapan paradigma *demand driven* dalam pendidikan kejuruan, sebuah pendekatan yang telah diperkenalkan oleh Wardiman Djoyonegoro sejak 1988. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal, pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan relevansi antara pendidikan di SMK dan kebutuhan tenaga kerja di DU/DI. Inti dari pendekatan *demand driven* adalah penyesuaian kurikulum dan proses pendidikan berdasarkan permintaan pasar kerja, tanpa sekadar menyesuaikan isi kurikulum dengan alat atau teknologi yang digunakan di industri, tetapi juga memperhatikan budaya kerja, standar kompetensi, serta ekspektasi profesional dari dunia kerja.

Untuk membangun sistem *link and match* dalam pendidikan kejuruan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kemitraan antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dan dunia usaha/dunia industri (DU/DI). Melalui kerjasama ini, SMK dapat lebih awal mengenali pemetaan dunia kerja, sehingga program pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Sebagai langkah awal, penyesuaian dan pengembangan komunikasi yang

berkelanjutan antara sekolah dan industri perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di SMK relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Dengan demikian, siswa dapat memperoleh bekal yang cukup untuk bersaing di dunia kerja (Depdiknas, 2009).

Selain itu, dalam rangka memperkuat kemitraan, SMK harus mengimplementasikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia usaha dan industri. Melalui kerjasama semacam ini, industri akan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur, agar dapat mengevaluasi efektivitas kemitraan yang dibangun. Indikator tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Sungkowo (2019) mengutip Sufyarma yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan pendidikan harus mencakup kualitas program studi, relevansi kurikulum dengan pasar kerja, kecukupan staf, fasilitas pendidikan yang memadai, serta pengelolaan yang efisien.

Indikator keberhasilan kerjasama antara SMK dan DU/DI dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: terbentuknya tim kerja kehumasan yang mampu menjalin kemitraan yang produktif, terlaksananya penjajakan kerjasama dengan mitra, adanya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), dan realisasi berbagai kegiatan yang mendukung keberhasilan program seperti pertukaran pelajar dan guru, serta pemagangan untuk meningkatkan kompetensi (Depdiknas, 2009). Keberhasilan ini dapat diukur dengan peningkatan kualitas pembelajaran, relevansi kurikulum dengan dunia kerja, serta tingkat keterserapan lulusan di dunia industri.

Penelitian oleh Ixtiarto dkk. (2016) mengenai kemitraan SMK dengan DU/DI di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah lulusan yang bekerja di industri, penempatan lulusan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemitraan telah berjalan, perlu adanya peningkatan dalam penyesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.

Sri Yuniati (2017) juga mengemukakan pentingnya manajemen kemitraan yang sesuai prosedur dalam menjalankan program Prakerin untuk memastikan bahwa peserta didik dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan industri. SMK harus melibatkan seluruh komponen dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar sekolah, untuk memastikan penyaluran tenaga kerja yang sesuai dengan bidang keahlian.

Kemitraan yang efektif juga menjadi faktor penting dalam membangun pendidikan kejuruan yang berkelanjutan, seperti yang dicontohkan oleh Okpor dkk. (2012), yang menunjukkan pentingnya hubungan antara sektor swasta dan publik dalam pendidikan teknis di Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh Okoye, Okwelle, dan rekan-rekannya (2013) juga mengungkapkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh sektor industri dan swasta dapat membantu mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap menghadapi tuntutan pasar tenaga kerja. Pendidikan kejuruan yang mengedepankan keterampilan praktis terbukti berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan ekonomi negara.

Namun, meskipun model manajemen PKL berbasis demand driven yang dikembangkan dalam penelitian ini telah menunjukkan potensi yang besar, terdapat

kekurangan, yaitu minimnya pelatihan yang diadakan oleh mitra DU/DI. Padahal, pelatihan yang diselenggarakan oleh mitra sangat penting untuk memastikan bahwa peserta didik memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pelatihan tersebut tidak hanya akan menguntungkan peserta didik, tetapi juga bagi sekolah dan DU/DI itu sendiri, karena dapat meningkatkan keselarasan antara kompetensi lulusan dengan tuntutan pasar kerja..

Kelebihan dari model ini adalah 1) Dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) PKL, maka PKL telah memiliki kekuatan hukum dan model manajemen PKL berbasis *demand driven* diharapkan dapat menjawab permasalahan peningkatan angka pengangguran yang sebagian besar dikontibusi oleh lulusan SMK. Melalui implementasi model ini diharapkan lulusan SMK akan lebih banyak bekerja di DU/DI. 2) Model ini dilengkapi dengan buku petunjuk pelaksanaan PKL yang berguna mempermudah sekolah dan DU/DI melakukan koordinasi. 3) Model ini didesain atas kerjasama DU/DI sebagai *demand driven*, dan SMK sebagai *supplier* serta pemerintah sebagai *controller*/pengawas atas kebijakan. 4) Model ini menciptakan prinsip saling menguntungkan. Kerjasama dapat memberi manfaat yang saling menguntungkan misalnya jika DU/DI menjadi tempat magang siswa SMK, DU/DI memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan citra DU/DI di masyarakat, dan SMK dapat menjadikan DU/DI sebagai wadah *demand* calon tenaga kerja. 5) Model ini menciptakan prinsip kesamaan perhatian. Kemitraan akan berjalan efektif jika SMK dan DU/DI memiliki kesamaan perhatian (*common interest*) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. DU/DI wajib menyisihkan sebahagian perhatiannya, sumberdaya yang dimilikinya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) untuk

pendidikan. 6) Model ini menciptakan kesamaan komitmen. Pelaksanaan kegiatan membutuhkan tenaga, waktu dan sumberdaya yang lain, oleh sebab itu dua pihak yang bermitra harus memiliki komitmen untuk menyediakan waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain. Dengan komitmen ini diharapkan tidak akan terjadi masalah kurang disiplin, kurang bertanggung-jawab, dan kurang semangat untuk bekerja keras. Dengan komitmen yang tinggi, program diharapkan dapat berhasil efektif dan efisien.

Pengembangan Model Manajemen PKL berbasis demand driven dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan karakter kerja dan kompetensi yang perlu ditingkatkan pada siswa SMK. Melalui pendekatan yang memadukan pengalaman empirik, kajian teori, dan observasi langsung, strategi yang digunakan adalah dengan mengadopsi sistem kerja yang berlaku di industri dalam pembelajaran praktik di SMK. Sebagai salah satu pemasok tenaga kerja bagi industri, SMK harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pekerja yang disyaratkan oleh industri, agar lulusan yang dihasilkan mampu mengikuti sistem kerja yang ada di dunia industri.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa meskipun banyak SMK yang sudah melaksanakan PKL, tidak semua program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai manajemen PKL yang lebih terstruktur dan sistematis di SMK, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKL, sehingga siswa mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen PKL berbasis demand driven, yang dapat disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika dunia industri yang terus berkembang. Judul penelitian adalah Pengembangan Model Manajemen Program Praktek Kerja Lapangan berbasis *Demand Driven* di SMK Kabupaten Tapanuli Tengah. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SMK sekaligus memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik model manajemen PKL yang dibutuhkan SMK di Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini?
- b. Bagaimana Tingkat kelayakan model PKL Berbasis *Demand and Driven* yang diimplementasikan di SMK Kabupaten Tapanuli Tengah?
- c. Bagaimana tingkat efektivitas model PKL Berbasis *Demand and Driven* yang diimplementasikan di SMK Kabupaten Tapanuli Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menemukan karakteritisk model manajemen PKL Berbasis *Demand Driven* di SMK Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Mengetahui tingkat kelayakan model Manajemen PKL berbasis Berbasis *Demand and Driven* yang diimplementasikan di SMK Kabupaten Tapanuli Tengah

- c. Mengukur tingkat efektivitas model Manajemen PKL berbasis Berbasis *Demand and Driven* yang diimplementasikan di SMK Kabupaten Tapanuli Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Teoritis

Memberikan pengarah konsep manajemen pendidikan berbasis ilmiah melalui program PKL di tingkat SMK.

1.4.2. Praktis

- a. Bagi Pihak Sekolah. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan pengelolaan praktek kerja lapangan berbasis kebutuhan dunia kerja (*demand driven*) serta berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan di sekolah guna memperbaiki kualitas program yang dilaksanakan di sekolah.
- b. Bagi pihak DU/DI. Memberikan kontribusi pada pihak DU/DI dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pencapaian sasaran program kemitraan dalam praktek kerja lapangan dan pembelajaran siswa praktikum.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sebagai sarana penentuan kebijakan pelaksanaan PKL di SMK yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah
- d. Peneliti Lain. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan pengembangan penelitian berikutnya.